

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Adellia Pratiwi^{*1}, Duwi Yunitasari¹, Regina Niken Wilantari¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Jember, Jember, 68121, Indonesia.

*Email korespondensi: pratiwiadellia1@gmail.com

Diterima 15 Agustus 2021; Disetujui 18 September 2021; Dipublikasi 23 Oktober 2021

Abstract: Indonesia has a change in the government system from centralization to autonomy. The implementation of autonomy supported by fiscal decentralization has the objective of making the autonomous region independent in managing the regional finance, including increasing the Locally-Generated Revenue (PAD) to finance regional activities. This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization and find out the impact of fiscal decentralization on the economic growth in East Java Province, especially in districts/cities in the North-South Corridor. This study used the analysis in the degree of fiscal decentralization and the panel data regression analysis with fix effect model. The results of the analysis in the degree of fiscal decentralization show that East Java Province, especially districts/cities in the North-South Corridor, is still in the lack category with an average of DDF less than 20%. Meanwhile, the result of panel data regression analysis shows that the degree of fiscal decentralization has a positive and significant impact on economic growth, capital expenditure has a negative but not significant impact on the economic growth, and TPAK (Labour Force Participation Rates) has a positive and significant impact on the economic growth.

Keywords: Degree of Fiscal Decentralization, Economic Growth, North-South Corridor

Abstrak: Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi otonomi. Pelaksanaan otonomi yang didukung desentralisasi fiskal memiliki tujuan agar daerah otonom mandiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk meningkatkan PAD untuk membiayai kegiatan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisa derajat desentralisasi fiskal serta melihat pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis derajat desentralisasi fiskal dan analisis regresi data panel dengan model *fix effect*. Hasil analisis derajat desentralisasi fiskal menunjukkan Provinsi Jawa Timur, khususnya kabupaten/kota yang berada di Koridor Utara Selatan rata-rata masih berada pada kategori kurang dengan rata-rata DDF kurang dari 20%. Sedangkan, hasil analisis regresi data panel menunjukkan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Koridor Utara Selatan

Pelaksanaan pembangunan melalui sistem sentralisasi ternyata tidak selalu berdampak positif

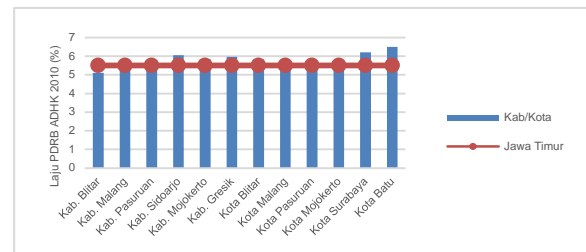
bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia merupakan negara kepulauan dimana setiap

daerahnya memiliki potensi maupun karakteristik yang beragam. Selain itu, pembangunan secara sentralisasi menimbulkan permasalahan yaitu terjadi disitegrasi, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, kualitas hidup masyarakat rendah, serta permasalahan pada pembangunan sumber daya. (Febriantoko, 2017; Sianturi dan Miyastro, 2011). Sehingga, pada 1 Januari 2001 pemerintah mulai memberlakukan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang selanjutnya diamandemen menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah mengubah sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi otonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah yang didukung dengan kebijakan desentralisasi fiskal memiliki tujuan agar daerah otonom mampu atau mandiri dalam mengelola potensi daerahnya dan menjadikan sumber pendapatan untuk melakukan pembiayaan terkait dengan kegiatan pemerintahan daerah. Sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil (Putra dan Hidayat, 2016). Pada pembangunan daerah, keuangan daerah memiliki peranan yang penting, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana PAD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi yang baik (Sistiana dan Makmur, 2014). Provinsi Jawa Timur sendiri dibagi menjadi 4 koridor pembangunan salah satunya adalah Koridor Utara Selatan (Andiatma, 2014). Kabupaten/kota yang berada pada koridor ini rata-rata memiliki

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dapat dilihat pada gambar 1.



Grafik 1. Laju PDRB ADHK 2010 Kabupaten/Kota Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Pada grafik 1, jelas bahwa rata-rata laju PDRB kabupaten/kota yang berada di Koridor Utara Selatan lebih tinggi dari laju PDRB Jawa Timur sebesar 5.50%. Kota Batu menjadi daerah dengan laju PDRB tertinggi sebesar 6.50% dan terendah adalah Kabupaten Blitar sebesar 5.10%.

Meskipun Provinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, khususnya pada Koridor Utara Selatan muncul pertanyaan, apakah PAD yang dimiliki daerah-daerah tersebut telah berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya atau dana transfer dari pemerintah yang berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis kemampuan keuangan daerah melalui analisis derajat desentralisasi fiskal, serta melihat pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Koridor Utara Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Sasana (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari keadaan ekonomi suatu negara yang secara fisik mengalami

perkembangan, seperti bertambahnya infrastruktur, jumlah produksi barang, dan penambahan serta perkembangan pada kegiatan-kegiatan ekonomi. Menurut Idris (2016:72) pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui peningkatan *Gross National Bruto* (GNP) riil, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Sianturi dan Wiwoho, 2018). Solow Swan menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang saling berhubungan dalam memberikan pengaruh dan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, tabungan, serta teknologi.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Idris, 2016:31). Pada pelaksanaan otonomi daerah, pengeluaran pemerintah digunakan untuk memberikan pelayanan atau fasilitas-fasilitas publik dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat. Musgrave dan Rostow menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, dimana kontribusi dari investasi pemerintah akan semakin kecil sejalan dengan berkembangnya tahap-tahap pembangunan ekonomi (Idris, 2016: 33). Selain itu, Aldof Wagner juga menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah cenderung

meningkat sejalan dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk fungsi pertahanan keamanan, kesejahteraan, perbankan, serta pembangunan (Idris, 2016:35).

Pembagian Kekuasaan

Teori pembagian kekuasaan dikenal dengan nama *Trias Politica*. Menurut penjelasan dari Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang yang sama, maka tidak ada kebebasan yang dapat menyebabkan monarki. Sehingga, kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif dipisahkan (Sondakh, 2013). Pembagian kekuasaan identik dengan pembagian secara vertikal dan horizontal. Menurut Budiardjo (2003:267), secara vertikal, pembagian kekuasaan didasarkan pada tingkatannya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Sedangkan secara horizontal, pembagian kekuasaan didasarkan pada fungsi secara horizontal, dimana ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal dengan *Trias Politica* atau *division of power*. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini melahirkan pemerintah daerah yang otonom sebagai implikasi dari desentralisasi (Mahfud, 1999).

Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan di beberapa negara termasuk Indonesia, dikarenakan beberapa hal

misalnya dikarenakan luas wilayah suatu negara, besarnya jumlah dan keanekaragaman penduduk serta budayanya (Saragih, 2003). Di Indonesia, otonomi daerah berarti terjadi pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah (*subnational jurisdiction*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, otonomi daerah juga digunakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan birokrasi pemerintahan terhadap rakyat melalui pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Safitri *et al.* 2020). Tentunya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah terdapat sebuah kebijakan pendukungnya, yaitu desentralisasi fiskal yang memiliki pengertian, suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003).

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat desentralisasi fiskal merupakan gambaran besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Syahputra, 2017). Derajat desentralisasi fiskal atau yang disebut otonomi fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah (Putra dan Hidayat, 2016). Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan rumus:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Pendapatan Daerah

Belanja Modal

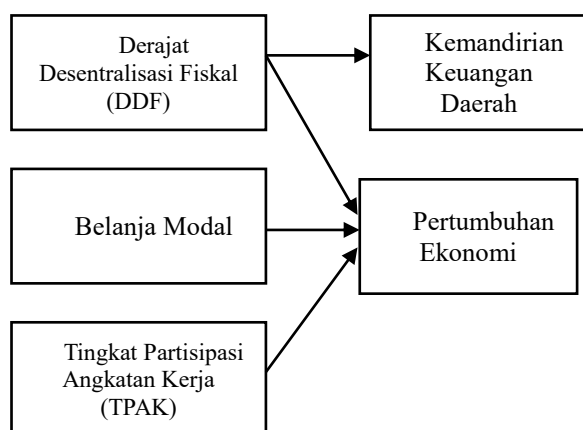
Secara makro, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel pembentuk PDB selain dari konsumsi masyarakat dan investasi (Azwar, 2016). Kebijakan ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah dalam kebijakan fiskal melalui pemenuhan kebutuhan publik dengan mekanisme pengadaan jasa atau barang oleh pemerintah melalui kegiatan belanja pemerintah. Belanja modal merupakan salah satu bentuk dari belanja pemerintah daerah pada APBD yang memiliki pengertian yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membentuk modal yang bersifat menambah aset tetap atau investaris pemerintah, menambah anggaran rutin untuk biaya operasional serta biaya pemeliharaan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Buana *et al.*, 2019). Jenis belanja modal berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, yaitu belanja modal tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan, jalan, serta belanja modal fisik lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah serta menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (BPS Jawa Timur, 2019). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Jika TPAK semakin

besar, maka angkatan kerja dalam kelompok juga semakin besar. Sebaliknya, jika jumlah penduduk yang berada pada kelompok bersekolah maupun mengurus rumah tangga semakin besar, maka jumlah angkatan kerja semakin kecil begitupula TPAK juga semakin kecil dan angkatan kerja semakin kecil (Mantra, 2003).

Skema Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan skema pemikiran, maka hipotesis pada penelitian ini adalah

- a. H_1 : Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
- b. H_2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
- c. H_3 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan kuantitatif *explanatory* dengan menggunakan regresi data panel. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan studi data sekunder atau analisis isi (Sistiana dan Makmur, 2014). Sedangkan penelitian *explanatori* akan menguji

hubungan antar variabel yang telah dihipotesiskan untuk diuji kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data panel yang merupakan data gabungan dari data *time series* dan *cross section*, dimana data *time series* tahunan yaitu tahun 2014-2018 dan *cross section* terdiri dari 12 kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan. Data yang diperoleh yaitu berupa data laporan realisasi APBD dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu. Dari data ini akan diperoleh data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah (TPD), dan Belanja Modal. Data pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluste sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten (Margono, 2004:127).

Variabel pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel dependen dan independen. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel dependen pada penelitian ini, dimana pengukurannya menggunakan data PDRB ADHK 2010. Variabel independen pada penelitian ini ada 3, yaitu; Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang diperoleh dari perhitungan PAD dengan TPD; belanja modal yang diproksi menggunakan rasio belanja modal berdasarkan perhitungan dari belanja modal dengan total belanja daerah; serta TPAK yang merupakan variabel independen terakhir.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, dimana data atau informasi yang didapatkan berasal dari literatur,

dokumentasi, serta unduhan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diunduh berasal dari website instansi terkait. Data pertumbuhan ekonomi dan TPAK didapatkan langsung dari website BPS Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.bps.go.id/>). Sedangkan, data DDF didapatkan dari hasil perhitungan PAD terhadap TPD, dimana baik data PAD maupun TPD didapatkan langsung dari laporan realisasi APBD pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>).

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ada 2, antara lain:

1. Analisis derajat desentralisasi fiskal merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan pada Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, hasil dari perhitungan diatas dapat dijelaskan dengan melihat skala interval berikut:

Tabel 1. Skala interval DDF

DDF (%)	Keterangan
0,00 – 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Sedang
30,01 – 40,00 %	Cukup
40,01 – 50,00 %	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.237.1996

2. Analisis regresi data panel yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Belanja Modal (BM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Alat yang digunakan untuk mengolah data yaitu

Microsoft Excel 2016 dan Eviews 9. Persamaan model regresi data panel pada penelitian ini yaitu:

$$PE_{it} = a + \beta_1 DDF_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

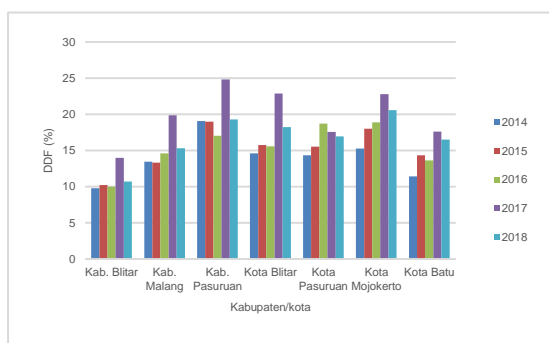
PE	= Pertumbuhan ekonomi
DDF	= Derajat desentralisasi fiskal
BM	= Belanja modal
TPAK	= Tingkat partisipasi angkatan Kerja
a	= <i>Intercept</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien variabel
ε	= <i>Error term</i>
i	= Jumlah kabupaten/kota Koridor Utara Selatan
t	= Kurun waktu 2014-2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

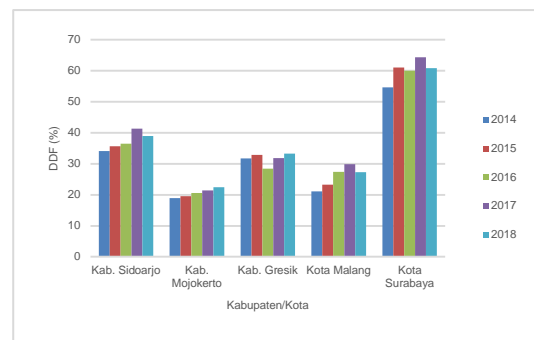
Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal didapatkan dari perhitungan antara PAD dengan TPD, dimana hasil dari perhitungan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah terutama dalam pembangunan serta menunjukkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang didukung dengan kesiapan keuangan daerah (Putra dan Hidayat, 2016; Syahputra, 2017). Hasil dari perhitungan analisis derajat desentralisasi fiskal pada 12 kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur menunjukkan selama periode 2014-2018, 7 kabupaten/kota yang berada pada Koridor Utara Selatan masih berada pada kategori kurang, dimana persentase DDF rata-rata kurang dari 20,00% per tahunnya (grafik 2). Daerah dengan DDF yang termasuk pada kategori kurang

diantaranya adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Batu. Kabupaten Blitar merupakan daerah dengan persentase DDF terkecil. Selama periode 2014-2018 DDF dari Kabupaten Blitar berkisar 9%-13%, dimana pada 2014 dan 2016 persentase DDF Kabupaten Blitar sebesar 9,80% dan 10,00% sehingga masuk pada kategori sangat kurang.



Grafik 2. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota pada Kategori Kurang Tahun 2014-2018

Lima kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kota Malang, dan Kota Surabaya memiliki persentase DDF lebih dari 20% per tahunnya (grafik 3). Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik berada pada kategori cukup dengan persentase DDF setiap tahunnya lebih dari 30%. Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang berada pada kategori sedang dengan persentase DDF rata-rata lebih dari 20% per tahun. Kota Surabaya merupakan daerah dengan persentase DDF lebih dari 50% setiap tahunnya, sehingga termasuk pada kategori sangat baik, dimana persentasenya sebesar 54,64% (2014); 60,97% (2015); 50,92% (2016); 64,25% (2017); 60,83% (2018).



Grafik 3. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota pada Kategori Sedang hingga Sangat Baik Tahun 2014-2018

Pada 2018, Kabupaten Blitar memiliki persentase DDF sebesar 10,73%, sehingga Kabupaten Blitar menjadi daerah dengan DDF terendah di wilayah Koridor Utara Selatan. Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 10,73% artinya kemampuan keuangan daerah yang berasal dari PAD dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah sebesar 10,73%, sedangkan sebesar 89,27% dibiayai oleh sumber keuangan lainnya terutama yang berasal dari transfer pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tahun 2018, Kota Surabaya memiliki DDF sebesar 60,83% yang artinya kemampuan keuangan daerah yang berasal dari PAD dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah sebesar 60,83% sedangkan sebesar 39,17% dibiayai oleh sumber keuangan lainnya. Besarnya persentase DDF mencerminkan besarnya kontribusi PAD pada pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang tinggi tentunya didukung fakta bahwa kegiatan perekonomian cenderung terkumpul di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya sehingga menjadi pusat perekonomian Provinsi Jawa Timur (Sistiana dan Makmur 2014; Cahyono, 2014). Sumber terbesar PAD Kota Surabaya berasal dari

pajak daerah, dimana kontribusinya sebesar 77% pada PAD Kota Surabaya.

Secara rata-rata selama periode 2014-2018 derajat desentralisasi kabupaten/kota yang berada di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur relatif kurang, dengan persentase kurang dari 20%. Artinya, kemampuan atau kinerja keuangan pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan fiskal yang cukup tinggi pada transfer dari pemerintah pusat. Derajat desentralisasi dibutuhkan semakin tinggi, mengingat pelaksanaan desentralisasi yang sudah cukup lama dilaksanakan. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh keuangan daerah yang memadai (Syahputra, 2017).

Analisis Regresi Data Panel

Pada regresi data panel ini terdapat beberapa model pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, untuk memilih model terbaik dilakukan melalui pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Langrange Multiplier* (LM). Berdasarkan uji yang telah dilakukan dalam memilih model terbaik, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik.

Uji asumsi klasik pada penelitian terdiri dari uji heterokedastisitas, autokorelasi, normalitas, dan multikolinieritas. Melalui Uji *Glejser*, hasil dari uji heterokedastisitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi permasalahan heterokedastisitas yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih besar dari $\alpha=5\%$. Selanjutnya uji autokorelasi yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara *error term* dengan variabel yang dilihat melalui letak dari nilai *Durbin-Watson*. Pada penelitian ini, nilai *Durbin-*

Watson (1.827822) berada diantara nilai *dU* (1.6889) dan *4-dU* (2.3111), sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi. Pada uji normalitas, nilai probabilitas *Jarque Berra* sebesar 0.576131 lebih besar dari $\alpha=5\%$, maka residual terdistribusi secara normal. Terakhir, uji multikolinearitas menunjukkan nilai dari masing-masing variabel lebih dari 0.8, sehingga asumsi klasik multikolinearitas terpenuhi. Pada penelitian ini tidak terjadi permasalahan uji asumsi klasik, sehingga memenuhi persyaratan *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

Hasil penelitian selanjutnya adalah hasil dari estimasi regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Model Fixed Effect

Variabel	Coefficient	t-Stat.	Prob.
C	8.875454	27.20774	0.0000
DDF	2.105564	6.355009	0.0000
BM	-0.277085	-1.352001	0.1831
TPAK	1.492395	3.1803398	0.0027
<i>R-squared</i>		0.818580	
<i>Adjusted R-square</i>		0.808138	
F-stat		2260.072	
Prob (F.stat)		0.000000	
t-tabel		1.67252	

Sumber: Hasil olah data melalui Eviews 9

Berdasarkan tabel 2, hasil estimasi regresi data panel dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$PE = 8.875454 + 2.105564 DDF - 0.277085 BM + 1.492395 TPAK + \varepsilon_{it}$$

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) memiliki probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$ (0.05), sehingga derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan DDF, belanja modal menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar $0,1831 > 0,05$. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan hasil yang sama dengan DDF, yaitu berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0027 < 0,05$.

Uji F pada tabel 2 terbagi menjadi 2, yaitu uji f-statistik dan probabilitas f-statistik. Perbandingan nilai f-statistik sebesar $2260,072 > f$ -tabel sebesar 2.77. Artinya, secara bersama-sama DDF, belanja modal, dan TPAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya nilai probabilitas dari f-statistik sebesar $0,000000 < 0,05$ mengartikan bahwa secara bersamaan DDF, belanja modal, dan TPAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada perhitungan uji-t, dilakukan pengujian yaitu membandingkan nilai probabilitas t-statistik dengan $\alpha = 0,05$. Probabilitas t-statistik pada variabel DDF sebesar $0,0000 < 0,05$ mengartikan bahwa DDF berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas t-statistik variabel belanja modal sebesar $0,1831 > 0,05$ mengartikan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, probabilitas dari t-statistik TPAK sebesar $0,0027 < 0,05$ mengartikan bahwa TPAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis regresi data panel pada tabel 2 menunjukkan nilai *R-squared* sebesar 0.818580, artinya pengaruh variabel DDF, belanja modal, dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 81,85% dan sisanya sebesar 18.15% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Koridor Utara Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Al-Aksari (2017) yang melakukan penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo, dimana desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah Teori Federalisme Fiskal yang dikembangkan oleh Hayek, Musgrave, dan Oates, dimana teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah yang akan mengatur daerahnya sendiri. Oates (1993) mengatakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi serta menyediakan barang publik, karena pemerintah daerah lebih mengerti keadaan masyarakat dan daerahnya (Kresnanda 2016; Sasana 2006).

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan gambaran besarnya kontribusi PAD pada pembangunan daerah, dimana PAD merupakan salah satu sumber pendapatan dan modal daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Pada Koridor Utara Selatan, Kota Surabaya merupakan daerah dengan DDF dan PAD tertinggi selama periode 2014-2018. Dimana, PAD Kota Surabaya 77% berasal dari ajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana, peningkatan PAD dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dan terjadi pengoptimalan serta peningkatan aktivitas pada sektor-sektor terkait (sektor industri dan perdagangan, jasa, serta sektor lainnya) (Rori *et al.*, 2016). Daerah dengan DDF terendah di Koridor Utara Selatan pada 2018 adalah

Kabupaten Blitar, dimana PAD Kabupaten Blitar sendiri pada 2018 sebesar Rp 252.453.245. Sumber terbesar dari PAD Kabupaten Blitar berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah sebesar 54,8% dan terkecil bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0.7%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang maksimal juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana Prakarsa (2013) menjelaskan bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, dikarenakan berakibat pada output daerah yang digambarkan melalui PDRB yang dihasilkan dari berbagai sektor pendapatan tidak berjalan maksimal.

Berbeda dengan DDF, belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Koridor Utara Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdiana (2017) yang melakukan penelitian mengenai kemandirian fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur, dimana belanja modal tidak secara signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengaruh langsung belanja modal tidak dapat dilihat dalam waktu dekat, namun efektivitas pengaruh belanja modal akan terlihat beberapa tahun yang akan datang, serta investasi swasta masih mendominasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang sejalan adalah penelitian dari Fajri (2016) yang meneliti mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera, dimana hasil penelitian menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal. Sehingga, peningkatan belanja modal tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.

Bappenas (2019) menjelaskan setiap peningkatan anggaran belanja yang dilakukan sebesar 1% akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.06%. Namun belanja modal yang meningkat sebesar 11% pada tahun 2016-2017 hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0.24%. Serapan belanja modal yang tinggi tidak selamanya produktif dan berdampak pada perekonomian, dikarenakan terdapat belanja modal yang digunakan untuk belanja komputer, belanja kendaraan dinas, atau belanja pembangunan kantor yang dihitung tidak begitu produktif (Bappenas, 2019). Selain belanja barang dan jasa, belanja modal merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang cukup besar untuk menambah aset daerah dan penyediaan barang-barang publik yang dapat berdampak secara langsung pada kegiatan pembangunan daerah, sehingga peningkatan belanja harus berfokus pada belanja modal dan belanja barang yang produktif bukan pada peningkatan belanja pegawai atau belanja barang yang tidak perlu. (Prakarsa, 2013).

Selanjutnya, pengaruh dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi dimana pengaruhnya positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Koridor Utara Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunardi *et al.*, (2017) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, dan TPAK terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian menunjukkan TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengertian bahwa, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja, maka angkatan kerja juga bertambah dan harus diimbangi dengan produktivitas kerja yang tinggi agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang juga sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian dari Rahmawati (2019) yang meneliti mengenai pengaruh IPM, TPAK, dan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow Swan (Neo-Klasik), dimana teori ini menjelaskan terdapat hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk, tabungan dan teknologi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori ini juga menyimpulkan bahwa hal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bukan hanya modal dan tenaga kerja yang bertambah, namun kemajuan teknologi serta bertambahnya tenaga kerja yang mahir dan ahli (Rahmawati, 2019).

Pada 2018, TPAK tertinggi di Koridor Utara Selatan adalah Kota Blitar sebesar 72.21% dan TPAK terendah adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 64.53%, dimana perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel merupakan lapangan pekerjaan utama yang paling banyak dilakukan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu lalu di Kota Blitar (BPS Jawa Timur, 2019). Tingkat pendidikan memengaruhi seseorang

dalam terlibat dengan kegiatan ekonomi, dimana kesempatan mendapatkan pekerjaan cenderung sejalan dengan tingkat pendidikan. Jika pasar kerja semakin banyak membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis cukup memadai, maka pasar kerja akan dipenuhi oleh mereka yang berpendidikan tinggi (BPS Jawa Timur, 2019). Di Koridor Utara Selatan sendiri tingkat pertumbuhan pekerja terdidik semakin meningkat dengan melihat peningkatan pada angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. misalnya, pada 2018, peningkatan angkatan kerja lulusan diploma dan universitas terjadi di Kota Blitar sebanyak 2.889 jiwa untuk lulusan diploma dan 10.967 jiwa untuk lulusan universitas. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu 2.652 jiwa lulusan diploma dan 9.872 jiwa lulusan universitas (BPS Jawa Timur, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai derajat desentralisasi fiskal, belanja modal, dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di Koridor Utara Selatan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur rata-rata masih berada pada kategori kurang dengan persentase kurang dari 20%.
2. Hasil perhitungan dari analisis regresi data panel dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya

- wilayah Koridor Utara Selatan.
- b. Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Koridor Utara Selatan.
 - c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Koridor Utara Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan serta dikaitkan dengan kesimpulan, maka saran perlu diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan langkah mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan, terutama bagi daerah-daerah yang DDF masih berada pada kategori kurang. Misalnya dengan pengoptimalan PAD tidak hanya melalui pajak atau retribusi daerah tapi juga bisa melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu dari laba atas penyertaan modal serta menarik investor asing melalui peran BUMD.
2. Pemerintah daerah harus memperhatikan kembali alokasi belanja modal dalam anggaran daerah. Perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan belanja modal harus berfokus pada tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang terhitung produktif. Selain itu, efektivitas belanja modal dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah dapat dialokasikan misalnya pada pembangunan

fasilitas publik (jalan, jembatan) dan pemberian fasilitas untuk para usaha kecil menengah.

3. Upaya dalam meningkatkan angkatan kerja yang berkualitas pada pasar tenaga kerja, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan tidak hanya melalui pendidikan formal dapat juga melalui bidang pendidikan non-formal (pelatihan).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aksari, S. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 6(1), 54-62.
- Andiatma, M. (2014). Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Koridor Utara Selatan Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 151-178.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 149-167.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2019). *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Bappenas. (2019). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2019*. Bappenas: Berita dan Siaran Pers.
- Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. *Ekonomi Pertahanan*, 4(2).
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

- Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, B. D. (2014). Identifikasi Derajat Kompetisi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 47-54.
- Depdagri. (1997), Kepmendagri No. 690.900.237 (1996). Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29-35.
- Febriantoko, J. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera. *SNTIBD*, 2(1), 51-57.
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Idris, A. (2016). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(2).
- Mahfud, M. (1999). *Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mantra, I. B. (2003). *Demografi Umum Edisi Kedua*. Yogyakarta: Pustaka.
- Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237-243.
- Prakarsa, F. D., & Noor, I. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243-256.
- Rahmawati, Y. O. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 1995-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *EFISIENSI*, 16(2).
- Rusdiana, A. (2017). *Analisis Kemandirian Fiskal dalam Era Otonomi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Safitri, W., Yunitasari, D., & Komariyah, S. (2020). Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah di Indonesia). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 7(1), 54-58.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

- Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 3(2), 146-170.
- Sianturi, R., & Wiwoho, B. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(1), 573-588.
- Sianturi, Y. S., & Miyasto, M. (2011). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(4), 277-286.
- Sondakh, J. (2013). Telaah Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi dalam Pengaturan Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(1), 1-16.
- Sunardi, Y. P., Rumat, V.A., & Siwu, H.F. Dj. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01).
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12-21.